

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Majalaya terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi :

1. Komunikasi : Dalam penyapaian implementasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa sudah jelas sehingga masyarakat sudah mengerti dan tahu atas adanya pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Majalaya. Aparatur desa juga sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang adanya APBDes walaupun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang juga belum terlalu paham akan adanya APBDes dan Implementasinya terhadap desa itu sendiri. Oleh karena itu satu dari tiga hal dalam komunikasi sepenuhnya belum sesuai yaitu, penyaluran yang belum baik sehingga akan menghasilkan implementasi yang belum baik pula, adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan, dan adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan.
2. Sumber Daya : Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi, dan metoda. Dalam sumber daya lah terdapat masalah, terutama dalam sumber daya manusia

yang dimana masih ada aparatur yang belum mengerti dan memahami akan pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban dikarenakan kualitas aparturnya sendiri yang tergolong rendah, Pendidikan yang juga masih rendah dikarenakan Pendidikan yang ditempuh hanya Pendidikan standar yang hanya wajib sekolah 9 (Sembilan) sampai 12 tahun. Faktor usia yang juga mempengaruhi akan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dimana aparatur desa kurang bisa menghafal atau mengingat kode rekening itu sendiri. sehingga itu sumber daya manusia dalam hal ini sangat mempengaruhi kendala yang terjadi dalam pelaporan pertanggungjawaban.

3. Disposisi : Dalam hal ini sudah berjalan dengan baik karena aparatur desa sendiri dalam mengimplementasi kebijakan APBDes dengan komitmen untuk memajukan Desa Majalaya agar tidak tertinggal dengan desa lain-lain yang ada disekitar Kabupaten Bandung terlebih khusus di Kecamatan Majalaya. Dalam hal kejujuran juga sudah sesuai diakarenakan setiap ada kegiatan selalu diberitahukan kepada masyarakat agar masyarakat tahu dan menunjukkan transparansi. Dalam sifat demokratis juga telah sesuai dengan semestinya, karena dalam memutuskan sesuatu aparatur desa juga selalu memusyawarakan dengan masyarakat agar tidak terjadi salah pengertian antar masyarakat dan aparatur desa. Sehingga disposisi dalam hal ini sepenuhnya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan semestinya.
4. Struktur Birokrasi : Birokrasi sudah teratur dengan baik sehingga dapat diketahui dan dipahami apa tugas-tugas yang dilakukan oleh aparatur yang

masuk dalam sistem organisasi Desa Majalaya dan juga dapat diketahui siapa yang dapat bertanggungjawab dalam bidangnya masing-masing, seperti kepala desa yang harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan juga Kecamatan Majalaya atas kegiatan APBDes yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sehingga itu dalam struktur birokrasi sudah cukup baik.

Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Majalaya :

1. Faktor Penghambat : Berdasarkan hasil penelitian ini juga ditemukan beberapa hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa diantaranya: a. Keterlambatan dana yang turun dari pemerintah sehingga perangkat desa kesulitan dalam proses penyusunan APBDesa; b. Penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan alokasi yang telah di tentukan sebelumnya karena adanya kebijakan yang berubah-ubah.
2. Faktor Pendukung : Ada pula upaya yang di lakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, hal ini di lakukan dengan cara melakukan koordinasi kepada dinas terkait agar perangkat mengetahui kapan dan berapa dana yang akan turun ke desa, untuk memperlancar proses penyusunan keuangan desa, tidak merubah kesepakatan dan rencana yang telah di tentukan sebelumnya.

5.2. Saran

5.2.1 Saran Akademis

Untuk menambah kegunaan keilmuan, disarankan pada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan kajian lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan lainnya yang berkaitan dengan konsep-konsep manajemen pemerintahan seperti koordinasi dan pengawasan dalam implementai kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa majalaya sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi perkembangan kajian Ilmu Pemerintahan.

5.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut;

1. Mengingat kembali bahwa keberadaan program APBDes adalah untuk pemberdayaan masyarakat desa dan juga kamajuan desa, maka diharapkan Dinas PMD selaku pembantu atau perpanjangan tangan bupati dalam pelaksanaan dan pengawasan program ini dapat lebih intensif mengadakan pelatihan terhadap pemerintah dan perangkat desa serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan APBDes di desa.
2. Penambahan personalia untuk membantu mengelola keuangan desa dan diharapkan masyarakat Desa Majalaya untuk dapat berpartisipasi dan mendukung/membantu pelaksanaan kebijakan APBDes agar dapat berjalan dengan baik demi kemajuan Desa dan ikut mengawasi pengelolaan keuangan Desa.

3. Diharapkan juga peran serta dari Tim Pendamping dari Kecamatan untuk dapat selalu membantu perangkat Desa terkait pembinaan dan pengawasan dan juga dalam pelaksanaan kebijakan APBDes di Desa Majalaya, serta sebaiknya aparatur desa diberi pengetahuan dan pengenalan akan IPTEK dan juga Pendidikan yang lebih baik agar pengetahuan akan pembuatan laporan pertanggungjawaban menjadi lebih baik dan tidak terhambat.
4. Sosialisasi kembali dengan masyarakat akan adanya kebijakan mengenai pelaksanaan APBDes yang dilakukan, dan mencari jalan keluar bersama masyarakat agar tidak terjadinya suatu kesalah pahaman.